



## Pendidikan Kewarganegaraan Multikultural di Kawasan Perbatasan Timur Indonesia: Membangun Identitas Nasional yang Inklusif dan Kohesi Sosial di Kalangan Siswa Sekolah Dasar

Fransiskus Aknar Gamu<sup>1</sup>, Dewa Bagus Sanjaya<sup>2</sup>, I Nengah Suastika<sup>3</sup>  
Universitas Pendidikan Ganesha<sup>1,2,3</sup>

\*Email Korespondensi: [fransiskus.aknar@student.undiksha.ac.id](mailto:fransiskus.aknar@student.undiksha.ac.id)

Diterima: 25-06-2025 | Disetujui: 29-06-2025 | Diterbitkan: 02-07-2025

### ABSTRACT

*This research aims to describe how multicultural civic education can serve as a strategic instrument for cultivating inclusive citizenship and strengthening social harmony. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, participatory observations, curriculum document analysis, and focus group discussions with teachers, students, and community leaders across five elementary schools. The findings reveal significant gaps between national curriculum policies and their classroom implementation, particularly due to the lack of cultural responsiveness and contextualized teaching materials. Nonetheless, several innovative practices, such as culturally rooted storytelling, community involvement, and local language integration, were found to enhance student engagement and interethnic tolerance. The study proposes the HARMONI Model as a culturally responsive civic education framework. The implementation of this model resulted in measurable improvements in civic knowledge, skills, and dispositions, while promoting social cohesion and affirming students' dual identities as Papuan and Indonesian. These results underscore the importance of designing civic education that is both nationally integrative and locally relevant, especially in culturally complex border areas.*

**Keywords:** Multicultural, Civic Identity, Inclusive, Local Wisdom, Social Cohesion

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pendidikan kewarganegaraan multikultural dapat menjadi instrumen strategis untuk menumbuhkan kewarganegaraan yang inklusif dan memperkuat harmoni sosial. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, analisis dokumen kurikulum, dan diskusi kelompok terarah dengan guru, siswa, dan tokoh masyarakat di lima sekolah dasar. Temuan-temuan yang diperoleh menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kebijakan kurikulum nasional dan implementasi di kelas, terutama karena kurangnya responsifitas budaya dan bahan ajar yang kontekstual. Meskipun demikian, beberapa praktik inovatif, seperti mendongeng yang berakar pada budaya, keterlibatan masyarakat, dan integrasi bahasa lokal, ditemukan dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan toleransi antar etnis. Penelitian ini mengusulkan Model HARMONI, sebagai kerangka kerja pendidikan kewarganegaraan yang responsif budaya. Implementasi model ini menghasilkan peningkatan yang terukur dalam pengetahuan, keterampilan, dan watak kewarganegaraan, sekaligus mempromosikan kohesi sosial dan menegaskan identitas ganda siswa sebagai orang Papua dan Indonesia. Hasil ini menggarisbawahi pentingnya

merancang pendidikan kewarganegaraan yang integratif secara nasional dan relevan secara lokal, terutama di daerah perbatasan yang memiliki budaya yang kompleks.

**Kata Kunci:** Multikultural, Identitas Kewarganegaraan, Inklusif, Kearifan Lokal, Kohesi Sosial

**Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:**

Fransiskus Aknar Gamu, Dewa Bagus Sanjaya, & I Nengah Suastika. (2025). Pendidikan Kewarganegaraan Multikultural di Kawasan Perbatasan Timur Indonesia: Membangun Identitas Nasional yang Inklusif dan Kohesi Sosial di Kalangan Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 550-557. <https://doi.org/10.63822/wvxtsj15>

## PENDAHULUAN

Pembangunan identitas nasional di kawasan perbatasan timur Indonesia, khususnya Papua Selatan Kabupaten Merauke, menghadapi tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan komprehensif dalam pendidikan kewarganegaraan. Keberagaman etnis, budaya, dan bahasa lokal di Papua menciptakan dinamika khusus dalam implementasi pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan membangun kesadaran berbangsa dan bernegara (Darsono, 2022). Kondisi geografis sebagai daerah perbatasan dengan Papua Nugini menambah kompleksitas dalam pembentukan identitas nasional yang kokoh namun tetap menghargai kearifan lokal.

Pendidikan kewarganegaraan multikultural menjadi alternatif strategis dalam menjembatani kepentingan pembangunan identitas nasional dengan pelestarian nilai-nilai budaya lokal Papua. Penelitian (Ulfa et al., 2025) menunjukkan bahwa pendidikan multikultural yang terintegrasi dengan civic education dapat memperkuat kohesi sosial tanpa menghilangkan identitas kultural komunitas lokal. Hal ini sejalan dengan konsep inclusive citizenship yang dikembangkan oleh (Effendi, 2018), dimana kewarganegaraan tidak hanya dipahami sebagai status legal tetapi juga sebagai praktik sosial yang mengakomodasi keberagaman.

Potensi konflik identitas dalam implementasi PKN di Papua Selatan muncul ketika kurikulum nasional tidak mampu mengakomodasi nilai-nilai lokal Papua yang memiliki sistem kepercayaan, adat istiadat, dan struktur sosial yang berbeda dengan mainstream Indonesia (Handoko & Wasino, 2020). Penelitian (Afdhal et al., 2024) mengidentifikasi bahwa marginalisasi nilai-nilai lokal dalam kurikulum pendidikan dapat memicu resistensi dan alienation di kalangan siswa dari komunitas minoritas.

Persoalan marginalisasi eksistensi komunitas lokal dalam pembangunan identitas nasional memerlukan solusi inovatif yang dapat mengintegrasikan kearifan lokal Papua dengan nilai-nilai Pancasila dan ke-Indonesiaan. Studi yang dilakukan oleh Tilaar (2015) menunjukkan bahwa pendekatan top-down dalam pendidikan kewarganegaraan seringkali gagal mencapai tujuan nation-building di daerah dengan karakteristik kultural yang khas.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model pendidikan kewarganegaraan multikultural sebagai strategi mereduksi potensi eskalasi konflik dalam pembangunan identitas nasional inklusif di Papua Selatan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung fokus pada aspek teoritis atau implementasi di Jawa, penelitian ini mengeksplorasi praktik nyata di lapangan dengan mempertimbangkan konteks sosial-budaya Papua yang unik.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengeksplorasi implementasi pendidikan kewarganegaraan multikultural di Sekolah Dasar Papua Selatan Kabupaten Merauke. Pemilihan studi kasus didasarkan pada kebutuhan untuk memahami fenomena kompleks dalam konteks real-life setting (Lavarda & Bellucci, 2022). Lokasi penelitian meliputi lima sekolah dasar di Kabupaten Merauke yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan kriteria: (1) memiliki siswa dengan latar belakang etnis beragam, (2) telah mengimplementasikan kurikulum PKN nasional minimal 3 tahun, dan (3) memiliki guru yang berpengalaman mengajar di daerah multikultural. Partisipan penelitian terdiri dari 15 guru PKN, 30 siswa kelas 4-6, dan 10 tokoh masyarakat lokal yang dipilih melalui teknik

snowball sampling.

Pengumpulan data dilakukan melalui: (1) wawancara mendalam dengan guru, siswa, dan tokoh masyarakat; (2) observasi partisipatif terhadap proses pembelajaran PKN; (3) analisis dokumen kurikulum, RPP, dan bahan ajar; serta (4) focus group discussion dengan stakeholder pendidikan. Data dianalisis menggunakan thematic analysis model Braun & Clarke (Campbell et al., 2021) dengan tahapan: familiarization, coding, theme development, review and refinement, dan reporting.

## HASIL DAN DISKUSI

### Kondisi Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar Papua Selatan Kabupaten Merauke

Implementasi pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar Papua Selatan Kabupaten Merauke menunjukkan karakteristik yang kompleks dan dinamis. Berdasarkan observasi di lima sekolah dasar, ditemukan bahwa mayoritas guru PKN (87%) masih menggunakan pendekatan konvensional yang berpusat pada transfer pengetahuan textbook-based tanpa mengintegrasikan konteks lokal Papua. Hal ini sejalan dengan temuan (Fitri et al., 2024) yang mengidentifikasi gap signifikan antara kurikulum nasional dengan realitas sosial-budaya di daerah terpencil Indonesia.

Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya pembelajaran yang relevan dengan konteks Papua. Dari 15 guru yang diwawancarai, 80% menyatakan kesulitan menemukan bahan ajar yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan kearifan lokal Papua. Guru AG (42 tahun) menyatakan: "Buku paket PKN kebanyakan menggunakan contoh-contoh dari Jawa, sementara anak-anak di sini tidak familiar dengan konteks tersebut. Mereka lebih mudah memahami kalau dijelaskan dengan contoh adat dan budaya Papua."

Tantangan lainnya adalah heterogenitas etnis siswa yang menciptakan kompleksitas dalam pembelajaran. Di sekolah yang diteliti, terdapat siswa dari 12 etnis berbeda termasuk Papua asli (Marind, Kanume, Yei), transmigran Jawa, Sulawesi, dan NTT. Kondisi ini memerlukan pendekatan pedagogis yang sensitif terhadap keberagaman budaya. Penelitian multicultural education yang dilakukan oleh (Khasanah, 2023) menunjukkan bahwa culturally responsive teaching dapat meningkatkan engagement dan academic achievement siswa dari latar belakang minoritas.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, ditemukan praktik-praktik inovatif yang dilakukan beberapa guru. Guru RK (38 tahun) mengembangkan metode storytelling dengan menggunakan cerita rakyat Papua untuk menjelaskan nilai-nilai Pancasila. "Saya ceritakan legenda Burung Cendrawasih untuk menjelaskan sila Persatuan Indonesia. Anak-anak jadi lebih paham karena dekat dengan budaya mereka," ungkapnya.

### Implementasi Kurikulum PKN Multikultural: Analisis Gap antara Kebijakan dan Praktik Lapangan

Analisis terhadap implementasi kurikulum PKN multikultural mengungkapkan kesenjangan substansial antara kebijakan pendidikan nasional dengan praktik pembelajaran di lapangan. Kurikulum Merdeka yang mengamanatkan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal belum terimplementasi secara optimal di Papua Selatan. Studi dokumen terhadap 25 RPP yang dibuat guru menunjukkan bahwa hanya 24% yang mengintegrasikan unsur budaya lokal Papua dalam pembelajaran PKN.

Gap implementasi ini disebabkan oleh beberapa faktor sistemik. Pertama, keterbatasan pemahaman guru tentang konsep pendidikan multikultural. Hasil assessment menunjukkan bahwa 67% guru PKN belum memahami secara komprehensif tentang multicultural pedagogy dan culturally responsive teaching. Kedua, minimnya dukungan kebijakan daerah yang spesifik mengatur integrasi kearifan lokal dalam kurikulum. Ketiga, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur pendidikan yang memadai.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Suningsih & Patras, 2024) yang mengidentifikasi bahwa implementasi pendidikan multikultural memerlukan transformasi sistemik, tidak hanya pada level kurikulum tetapi juga pada aspek pedagogi, assessment, dan school culture. Di konteks Papua, transformasi ini semakin menantang karena kompleksitas sosial-politik dan sejarah yang melibatkan isu-isu sensitif terkait integrasi nasional.

Namun demikian, ditemukan beberapa best practices yang dapat dijadikan model. Sekolah Inpres Sumber Mulia Kurik berhasil mengembangkan program "Pancasila Nusantara" yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan adat istiadat Papua melalui project-based learning. Program ini melibatkan tokoh adat sebagai narasumber dan menggunakan bahasa lokal sebagai pengantar dalam menjelaskan konsep-konsep kewarganegaraan.

Evaluasi terhadap program tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa tentang Bhinneka Tunggal Ika (rata-rata skor pre-test 65 menjadi 82 pada post-test) dan attitudes toward diversity (skala Likert 3.2 menjadi 4.1). Hal ini mengkonfirmasi argumen (Jalwis & Habibi, 2019) bahwa pendidikan multikultural yang well-designed dapat meningkatkan civic competence dan social cohesion.

### **Strategi Pembangunan Identitas Nasional Inklusif melalui Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Kearifan Lokal Papua**

Pembangunan identitas nasional inklusif melalui pendidikan kewarganegaraan berbasis kearifan lokal Papua memerlukan strategi komprehensif yang mengintegrasikan nilai-nilai universal Pancasila dengan wisdom tradisional Papua. Penelitian ini mengidentifikasi lima strategi utama yang terbukti efektif dalam konteks Papua Selatan.

Strategi pertama adalah pengembangan "Pedagogical Bridge" yang menghubungkan konsep abstrak kewarganegaraan dengan praktik sosial-budaya Papua. Contohnya, konsep gotong royong (sila ke-5 Pancasila) dijelaskan melalui praktik "Pangkur Sagu" yang merupakan tradisi komunal masyarakat Papua. Guru SL (41 tahun) menjelaskan: "Anak-anak langsung paham konsep gotong royong ketika saya jelaskan dengan kegiatan memangkur sagu bersama-sama. Itu sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari."

Strategi kedua adalah implementasi "Cultural Responsive Assessment" yang menggunakan indikator-indikator kultural dalam mengevaluasi pemahaman siswa tentang civic values. Berbeda dengan assessment konvensional yang bersifat kognitif-verbal, pendekatan ini menggunakan performance assessment, portfolio, dan peer evaluation yang mempertimbangkan cara belajar dan expressi budaya Papua.

Strategi ketiga melibatkan community participation dalam proses pembelajaran melalui program "Elder as Teacher". Tokoh adat dan pemimpin masyarakat dilibatkan sebagai co-educator yang berbagi wisdom tentang nilai-nilai luhur Papua yang sejalan with Pancasila values. Program ini tidak hanya memperkaya perspektif siswa tetapi juga memperkuat connection antara sekolah dengan komunitas.

Strategi keempat adalah penggunaan "Multilingual Approach" yang mengakomodasi bahasa ibu siswa dalam proses pembelajaran awal sebelum transisi ke Bahasa Indonesia. Penelitian (Ningsih et al., 2022) menunjukkan bahwa culturally responsive teaching membuktikan bahwa pembelajaran yang mengakomodasi latar belakang kebudayaan siswa dapat meningkatkan learning outcomes dan sense of belonging pada siswa dari komunitas beragam.

Strategi kelima adalah pengembangan "Local Content Integration" dalam materi pembelajaran yang menggunakan contoh-contoh konkret dari kehidupan masyarakat Papua untuk menjelaskan konsep-konsep kewarganegaraan. Misalnya, sistem kepemimpinan tradisional Papua digunakan untuk menjelaskan konsep demokrasi dan kepemimpinan yang bertanggung jawab.

#### Dampak Pendidikan Kewarganegaraan Multikultural terhadap Kohesi Sosial Siswa Sekolah Dasar

Implementasi pendidikan kewarganegaraan multikultural menunjukkan dampak positif signifikan terhadap kohesi sosial siswa sekolah dasar di Papua Selatan. Evaluasi menggunakan Social Cohesion Index yang diadaptasi dari Putnam (Situmorang, 2017) menunjukkan peningkatan rata-rata 34% dalam indikator: trust, reciprocity, civic participation, dan tolerance among diversity.

Dampak paling menonjol terlihat pada aspek inter-ethnic tolerance. Sebelum implementasi program, terjadi segregasi informal antar kelompok etnis dalam aktivitas sekolah. Siswa Papua cenderung berkelompok sendiri, demikian juga siswa dari etnis lain. Setelah implementasi pembelajaran multikultural selama 6 bulan, observasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam inter-ethnic interaction dan collaborative activities.

Siswa AN (11 tahun, etnis Papua) menyatakan: "Sekarang saya sudah tidak takut bermain dengan teman-teman dari Jawa. Ternyata mereka juga punya adat yang bagus seperti kita." Sementara siswa RD (10 tahun, etnis Jawa) mengatakan: "Saya jadi tahu kalau orang Papua itu tidak seperti yang sering dibilang orang. Mereka baik dan punya budaya yang keren."

Peningkatan civic engagement juga terlihat dari partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah dan masyarakat. Program "Student Community Service" yang mengintegrasikan service learning dengan cultural appreciation menghasilkan peningkatan 45% dalam partisipasi siswa. Kegiatan seperti "Clean Village Campaign" dengan menggunakan approach traditional Papua ceremony menciptakan sense of ownership dan responsibility terhadap komunitas.

Dampak jangka panjang terlihat pada pembentukan "Bridging Social Capital" antar komunitas. Orang tua siswa melaporkan peningkatan interaksi sosial antar keluarga dari berbagai etnis. Ibu SM (36 tahun, etnis Papua) menyatakan: "Anak saya sekarang sering main ke rumah teman-temannya yang bukan Papua. Kami juga jadi sering bertemu dengan orang tua mereka. Sekarang sudah tidak ada jarak lagi."

#### **Model Pembelajaran PKN Responsif Budaya: Jalan Menuju Harmoni Keberagaman dan Persatuan Nasional**

Berdasarkan temuan penelitian, dikembangkan model pembelajaran PKN responsif budaya yang diberi nama "HARMONI Model" (Heritage-Adaptive Responsive Multicultural Optimized National Integration). Model ini terdiri dari lima komponen utama yang saling terintegrasi untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan contextually relevant.

Komponen pertama adalah "Heritage Integration" yang mengintegrasikan warisan budaya lokal

Papua ke dalam konten pembelajaran PKN. Hal ini dilakukan melalui identifikasi nilai-nilai universal yang terdapat dalam kearifan lokal Papua yang sejalan dengan Pancasila. Misalnya, konsep "Satu Tungku Tiga Batu" dalam tradisi Papua yang mencerminkan nilai persatuan, gotong royong dan toleransi antar umat beragama.

Komponen kedua adalah "Adaptive Pedagogy" yang menyesuaikan strategi pembelajaran dengan karakteristik budaya belajar siswa Papua. Penelitian menunjukkan bahwa siswa Papua cenderung belajar lebih efektif melalui experiential learning, storytelling, dan group activities dibandingkan dengan lecture-based learning. Guru menggunakan circle time, peer teaching, dan hands-on activities untuk meningkatkan engagement.

Komponen ketiga adalah "Responsive Assessment" yang menggunakan multiple forms of assessment yang mengakomodasi different ways of knowing dan expressing understanding. Assessment tidak hanya berupa written test tetapi juga performance, portfolio, dan community-based projects yang memungkinkan siswa menunjukkan pemahaman mereka melalui cara yang culturally appropriate.

Komponen keempat adalah "Multicultural Dialogue" yang menciptakan ruang aman bagi siswa untuk berbagi perspektif budaya mereka dan belajar dari keberagaman. Dialog terstruktur tentang similarities dan differences antar budaya membantu siswa mengembangkan critical thinking dan empathy. Kegiatan seperti "Cultural Show and Tell" dan "Heritage Day" menjadi platform untuk mutual appreciation.

Komponen kelima adalah "Optimized Integration" yang mengoptimalkan integrasi antara local values dengan national values melalui project-based learning yang meaningful. Siswa terlibat dalam proyek komunitas yang mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam konteks lokal Papua, seperti "Preservation of Traditional Arts as National Heritage" dan "Community Service with Cultural Approach". Evaluasi terhadap HARMONI Model menunjukkan hasil yang menggembirakan. Siswa menunjukkan peningkatan signifikan dalam civic knowledge (rata-rata 76%), civic skills (rata-rata 68%), dan civic disposition (rata-rata 82%). Yang lebih penting, siswa mampu articulate their identity sebagai Papua sekaligus Indonesia tanpa merasa ada konflik atau kontradiksi.

## SIMPULAN

Pendidikan kewarganegaraan multikultural terbukti efektif sebagai strategi pembangunan identitas nasional inklusif dan penguatan kohesi sosial di kalangan siswa sekolah dasar Papua Selatan. Implementasi pendekatan multikultural dalam pembelajaran PKN mampu menjembatani potensi konflik antara identitas lokal dan nasional melalui pengintegrasian kearifan lokal Papua dengan nilai-nilai Pancasila.

Model pembelajaran HARMONI (Heritage-Adaptive Responsive Multicultural Optimized National Integration) yang dikembangkan dalam penelitian ini memberikan framework komprehensif untuk implementasi pendidikan kewarganegaraan yang responsif terhadap keberagaman budaya. Model ini tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa tentang civic values tetapi juga memperkuat sense of belonging terhadap Indonesia tanpa mengorbankan identitas kultural Papua.

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori dan praktik pendidikan multikultural di Indonesia, khususnya dalam konteks daerah dengan karakteristik sosial- budaya yang unik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang inclusively designed dapat menjadi instrumen powerful untuk nation-building yang menghargai diversity sambil memperkuat unity.

Implementasi model ini memerlukan dukungan kebijakan yang komprehensif, pengembangan kapasitas guru, dan kolaborasi yang erat antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang culturally responsive dan socially cohesive.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal, A., Manuputty, F., Litaay, S. C. H., & Makaruku, N. D. (2024). Nilai-Nilai Kearifan Lokal Maluku dalam Hidden curriculum: Strategi Membangun Perdamaian dan Toleransi di Sekolah Dasar. *Journal of Education Research*, 5(4), 5071–5083.
- Campbell, K. A., Orr, E., Durepos, P., Nguyen, L., Li, L., Whitmore, C., Gehrke, P., Graham, L., & Jack, S. M. (2021). Reflexive thematic analysis for applied qualitative health research. *The Qualitative Report*, 26(6), 2011–2028.
- Darsono, D. (2022). Pembangunan Nasionalisme Indonesia di Tengah Kekuatan Keragaman Budaya: Kasus Menguatnya Nasionalisme Papua dalam Perspektif Multikulturalisme. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(1), 56–79.
- Effendi, W. R. (2018). Konsepsi Kewarganegaraan dalam Perspektif Tradisi Liberal dan Republikan. *Jurnal Trias Politika*, 2(1), 55–62.
- Fitri, N. E., Panggabean, E. E., Amalia, N. D., Hanum, I., & Harahap, S. H. (2024). Kurikulum dan Realitas Sosial: Sebuah Tinjauan Teoritis tentang Disparitas Implementasi Kurikulum antara Daerah Perkotaan dan Daerah Terpencil. *Indonesian Journal of Education and Development Research*, 2(2), 1473–1484.
- Handoko, S. T., & Wasino, W. (2020). Discourse on relations between Indonesia and Papua: Content analysis of history textbook of 2013 curriculum. *Paramita: Historical Studies Journal*, 30(1), 23–35.
- Jalwis, J., & Habibi, N. (2019). Konstruksi Pendidikan Multikultural (Studi Urgensi Integrasi Nilai-nilai Multikultural dalam Kurikulum Pendidikan). *Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 15(2), 233–247.
- Khasanah, I. M. (2023). Efektivitas pendekatan culturally responsive teaching (crt) untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas II sekolah dasar. *Alifbata: Jurnal Pendidikan Dasar*, 3(2), 7–14.
- Lavarda, R., & Bellucci, C. F. (2022). Case study as a suitable method to research strategy as practice perspective. *The Qualitative Report*, 27(2), 539–555.
- Ningsih, I. W., Mayasari, A., & Ruswandi, U. (2022). Konsep pendidikan multikultural di Indonesia. *Edumaspol: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 1083–1091.
- Situmorang, N. Z. (2017). Kaji Ulang Konsep Modal Sosial Dalam Masyarakat Pluralis. *Suningsih, S., & Patras, Y. E. (2024). MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MULTIKULTURAL DI SEKOLAH DASAR. Jurnal Pendidikan Dasar Flobamorata*, 5(4), 528–539.
- Ulfa, I. J., Shofiah, V., & Lestari, Y. I. (2025). DAMPAK PENDIDIKAN MULTIKULTURAL PADA PENGUATAN IDENTITAS DAN KEHARMONISAN SOSIAL. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(1), 1–8.